

BAB IV

SIMPULAN

Pembahasan mengenai efektivitas NPWP instansi pemerintah di KPP Pratama Banyuwangi sedikit banyak telah disampaikan pada bab 1, 2, dan 3 karya tulis ini sehingga penulis merasa telah memperoleh wawasan yang cukup untuk sampai pada beberapa kesimpulan berikut.

1. Sebelum adanya pengeskalasian NPWP bendahara menjadi NPWP instansi pemerintah, kondisi *database* MFWP bendahara tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Di mana jumlah WP terdaftar jauh lebih banyak daripada yang seharusnya terdaftar pada MFWP instansi pemerintah. Dengan adanya NPWP yang baru ini tentu memberikan dampak positif terhadap kondisi *database* sehingga dapat memberikan gambaran jumlah WPIP yang lebih baik.
2. Kepatuhan WPIP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dikatakan sangat rendah ketika NPWP bendahara masih menjadi identitas perpajakan suatu instansi. Namun setelah diterapkannya NPWP instansi pemerintah, tingkat kepatuhan WPIP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berangsur membaik. Di mana tingkat pendaftarannya sudah mencakup hampir keseluruhan WPIP di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu untuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak instansi

pemerintah meningkat drastis dari kondisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi NPWP yang baru telah memberikan dampak yang positif bagi KPP Pratama Banyuwangi.

3. Pemenuhan Kewajiban wajib pajak instansi pemerintah dalam membayar dan melaporkan pajak di KPP Pratama Banyuwangi menjadi lebih baik setelah diterapkannya NPWP instansi pemerintah. Hal ini tampak pada peningkatan kepatuhan WPIP dalam menyetorkan dan melaporkan pajak di tahun pengimplementasian NPWP yang baru.
4. Tinjauan Efektivitas NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini tampak pada kondisi *database* MFWP instansi pemerintah yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya setelah diterapkannya NPWP yang baru. Selain itu efektivitas ini tampak pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak instansi pemerintah dalam menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah mereka potong/pungut. Efektivitas ini tentu merupakan hasil kerja sama antara pengguna dan penyedia fasilitas yang mampu bersinergi untuk mewujudkan kepatuhan pajak yang baik di wilayah administrasi KPP Pratama Banyuwangi.